



Dewan Minta Pengelolaan Dana Desa Transparan



Anggota DPRD Melawi, Kontansius Pose

MELAWI-RK. Anggota DPRD Melawi, Kontansius Pose meminta seluruh Kepala Desa (Kades) dan perangkatnya, transparan dan adil dalam mengelola keuangan desa. Baik itu Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahun.

Menurutnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan garda terdepan sebagai acuan dalam penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

"Di Melawi ada 169 desa sudah menerima jatah khusus setiap tahun melalui alokasi DD dari pemerintah yang rata-rata hampir Rp1 miliar setiap desa. Pertanyaannya, sudah ada kah hasil yang bisa dinikmati memuaskan oleh masyarakat desa dari berbagai sektor pemanfaatan DD tersebut terbuka dan transparan," paparnya, Selasa (6/8).

Terkait perolehan DD tersebut, legislator Partai Gerindra ini pun meminta Pemerintah Daerah untuk lebih transparan dan konsentrasi untuk memonitoring serta mengevaluasi kepada penggunaan dana tersebut, sehingga mimpi masyarakat desa menjadi sejahtera dengan adanya bantuan DD ini bisa terwujud.

Selain itu, dengan adanya Pemerintah Desa yang lebih terbuka kepada masyarakat soal pemanfaatan DD ini harus terjamin dan tepat sasaran dalam rangka memperbaiki ekonomi masyarakat.

"Kepada pemerintah sebagai pengawas, pembina serta tugas melekat untuk memonitoring dan mengevaluasi penggunaan DD tersebut harus terjun langsung ke seluruh desa untuk membuktikannya, terkait ada tidak hasilnya yang bersentuhan langsung dengan pembangunan masyarakat desa," ujarnya.

Selain itu, Pose juga menyampaikan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mesti ikut berperan mengawasi pemanfaatan semua dana yang masuk ke Pemerintahan Desa.

"Nah apakah fungsi BPD selama ini di desa sudah dijalankan, atau hanya jalan ditempat," katanya.

Ia menuturkan, selain fungsi BPD mengawasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), masyarakat juga harus begitu.

"Harus tau, ADD dan DD itu dapat bantuan berapa dan dimanfaatkan bidang apa saja, dan harus aktif mengawasi untuk apa manfaat dari DD itu," tuturnya.

Selain itu, masyarakat dan BPD juga harus aktif meminta Kades untuk melaporkan pertanggungjawaban DD ini setiap akhir tahun, sehingga masyarakat secara umum mengetahui pengalokasian anggaran.

"Setelah itu di audit masyarakat sendiri dulu. Apakah sesuai dengan laporan pertanggungjawaban Kades atau tidak. Kalau tidak sesuai atau ada pelanggaran, silahkan laporkan ke aparat penegak hukum," paparnya. **(Ira)**